



HASIL FGD REVIEW STANDAR PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN

KEBUMEN, 2 November 2022



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; dan
5. Peraturan Kabupaten Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja.



DISNAKER



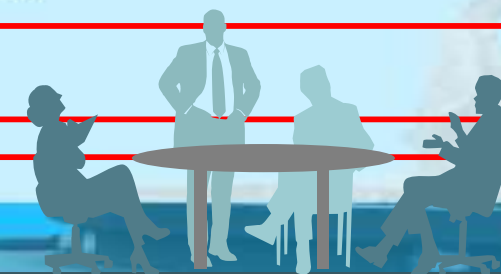
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS TENAGA KERJA



Jl. Cendrawasih No. 28 Kebumen Telepon (0287) 381462 Faksimile (0287) 381462

PELAYANAN LAMA

1. Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja (Kartu AK 1) ;
2. Pelayanan Rekom Paspot ;
3. Pelayanan Rekomendasi Pendirian/Perpanjangan Lembaga Pelatihan Kerja Latihan Swasta ;
4. Pelayanan Ijin Pelayanan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) ;
5. Pelayanan Ijin Pelayanan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) ;
6. Pelayanan Rekomendasi Ijin Pembentukan kantor cabang P3MI ;
7. Pelayanan Rekomendasi Pendirian Lembaga Penyelenggara Penempatan Swasta Antar Kerja Antar Daerah (LPPS AKAD) ;
8. Pelayanan Rekomendasi Ijin Perpanjangan mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) / Notifikasi
9. Pelayanan Pengesahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ;
10. Pelayanan Pengesahan Lembaga Kerjasama Bipartite ;
11. Pelayanan Pengesahan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ;
12. Pelayanan Pengesahan Sertifikat Lembaga Latihan Swasta ;
13. Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) ;
14. Pelayanan Penyelesaian Kasus PHI/PHK ;
15. Pelayanan Pendaftaran Calon Transmigran ;





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS TENAGA KERJA



Jl. Cendrawasih No. 28 Kebumen Telepon (0287) 381462 Faksimile (0287) 381462

PELAYANAN BARU

1. Pendaftaran dan Legalisir Ak 1
2. Pembuatan Rekomendasi Pasport
3. Pendaftaran Bursa Kerja Khusus (BKK)
4. Pendaftaran Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di UPTD Balai Latihan Kerja
5. Pendaftaran Pelatihan Berbasis Masyarakat (PBM)
6. Pelayanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
7. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama
8. Pendaftaran Lembaga Kerja Sama Bipartit
9. Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)
10. Pencatatan Pemborongan Pekerjaan
11. Pendaftaran Transmigrasi
12. Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah/Swasta

PEMBUATAN KARTU AK-1

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja
4. Peraturan Kabupaten Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy ijazah terakhir
3. Pas photo (3x4) 2 buah

Mekanisme:

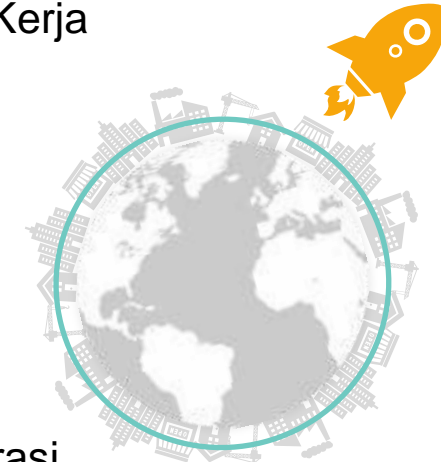
1. Mengisi (Form Pendaftaran) pada Bursa Kerja Kebumen, mendapatkan nomor registrasi
2. Nomor registrasi dibawa ke Mall Pelayanan Publik / Dinas Tenaga Kerja
3. Menyerahkan persyaratan
4. Cetak Kartu Pencari Kerja (AK1) di tandatangani Fungsional Pengantar Kerja /Petugas Antar Kerja

Lama Proses : 15 menit

Output : Kartu Ak-1

Biaya : Gratis

Pengaduan: https://bit.ly/LayananPengaduan_Disnaker



LEGALISIR KARTU AK-1

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

Persyaratan

1. Kartu AK-1 asli
2. Fotocopy Kartu Ak-1 maks 6 lbr

Mekanisme:

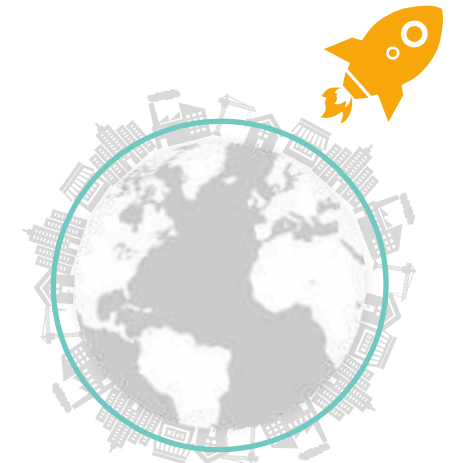
1. Menyerahkan persyaratan ke Mall Pelayanan Publik/Dinas Tenaga Kerja
2. Legalisir ditandatangani Fungsional Pengantar Kerja, Petugas Antar Kerja atau Pejabat Struktural

Lama Proses : 15 menit

Output : Legalisir Kartu Ak-1

Biaya : Gratis

Pengaduan: https://bit.ly/LayananPengaduan_Disnaker



REKOMENDASI PASPORT CPMI

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021. Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh BP3MI
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penerbitan Pasport Biasa bagi CPMI
6. Peraturan Bupati Kebumen No 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, SOTK Dinas Tenaga Kerja

Persyaratan

1. Surat Permohonan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dengan mengisi [google form](#)
2. Foto Copy E- KTP 1 lbr dan Foto copy Kartu Keluarga 1 Lbr
3. Foto Copy Ijazah Terakhir 1 Lbr dan Foto Copy Sertifikat Keahlian 1 lbr
4. Foto Copy Akta Kelahiran 1 Lbr dan Foto Copy Buku Nikah 1 Lbr
5. Surat Izin Orang Tua/Suami/istri (diketahui Kepala Desa/Lurah)

Mekanisme

1. menyerahkan persyaratan di Mall Pelayanan Publik atau Dinas Tenaga Kerja
2. Melaksanakan wawancara kesiapan bekerja di luar negeri dan pemahaman terkait perjanjian penempatan
3. Menginput data dan memasukan dalam aplikasi sistem layanan CPMI ([SiskoTKLN](#))
4. Menandatangani Surat Perjanjian Penempatan Kerja
5. Mencetak, Meneliti memparaf draft rekomendasi passport dan Berita Acara Seleksi
6. Ditandatangani Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi /Fungsional Pengantar Kerja

Lama Proses : 1 hari

Output : Rekomendasi Pasport

Biaya : Gratis

Pengaduan: https://bit.ly/LayananPengaduan_Disnaker



PENDAFTARAN BURSA KERJA KHUSUS (BKK)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

Persyaratan

1. Surat Permohonan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan mengisi *google form*
2. Foto kopi surat izin pendirian atau operasional sekolah
3. Foto kopi keputusan pembentukan Bursa Kerja Khusus
4. Struktur organisasi Bursa Kerja Khusus
5. Foto kopi KTP Ketua (2 lembar)
6. Pas foto Ketua (3 x 4) 2 lembar

Mekanisme:

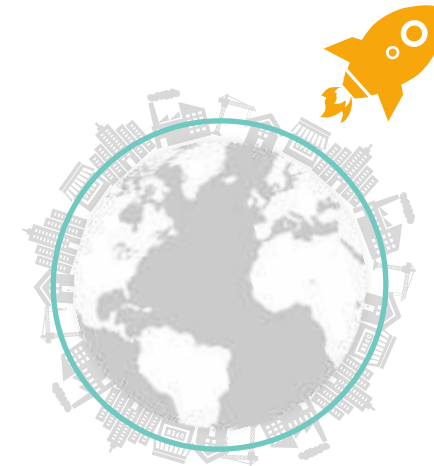
1. Menyerahkan persyaratan ke Dinas Tenaga Kerja
2. Tanda Daftar ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja

Lama Proses : 3 (tiga) hari

Output : Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus

Biaya : Gratis

Pengaduan: https://bit.ly/LayananPengaduan_Disnaker



PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

Persyaratan

1. Perusahaan yang memiliki Tenaga Kerja Min 10 orang
2. Surat Permohonan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan mengisi *google form*
3. Fotocopy Pengesahan Badan Hukum
4. Draft Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama .
5. Salinan Tanda Daftar Perusahaan

Mekanisme:

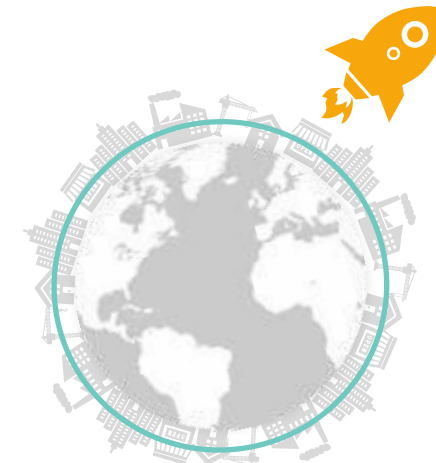
1. Menyerahkan persyaratan ke Dinas Tenaga Kerja
2. Meneliti draft Surat Keputusan Pengesahan sesuai dengan aturan ketenagakerjaan
3. Di validasi oleh Kepala Bidang Lattas HI atau Sub Koordinator Hubungan Industrial
4. Surat Keputusan Pengesahan ditandatangani Kepala Dinas.

Lama Proses : 7 hari

Output : SK Pengesahan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama

Biaya : Gratis

Pengaduan: https://bit.ly/LayananPengaduan_Disnaker



PENCATATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

Persyaratan

1. Surat Permohonan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan mengisi *google form*
2. Draft Perjanjian Kerja

Mekanisme:

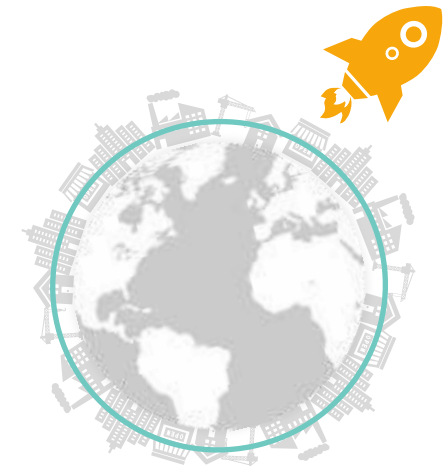
1. Menyerahkan persyaratan ke Dinas Tenaga Kerja
2. Meneliti draft perjanjian kerja
3. Di validasi Kepala Bidang Lattas HI atau Sub Koordinator Hubungan Industrial
4. Surat Bukti Pencatatan ditandatangani Kepala Dinas

Lama Proses : 7 hari

Output : Surat Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Biaya : Gratis

Pengaduan: https://bit.ly/LayananPengaduan_Disnaker



PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/BURUH, FEDERASI DAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh
3. Keputusan Menaker Nomor KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/serikat Buruh.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per.06/Men/IV/2005 Tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

Persyaratan

1. Surat Permohonan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan mengisi *google form*
2. Foto copy Berita Acara Pembentukan
3. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
4. Susunan pengurus
5. Daftar Nama Anggota Pembentuk

Mekanisme:

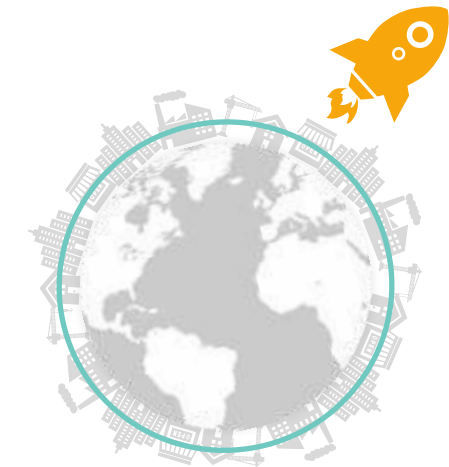
1. Menyerahkan persyaratan ke Dinas Tenaga Kerja
2. Di validasi Kepala Bidang Lattas HI atau Sub Koordinator Hubungan Industrial
3. Surat Bukti Pencatatan ditandatangani kepala Dinas

Lama Proses : 7 hari

Output : Surat Bukti Pencatatan serikat pekerja/buruh, federasi dan konfederasi

Biaya : Gratis

Pengaduan: https://bit.ly/LayananPengaduan_Disnaker



PENDAFTARAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang No 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

Persyaratan

1. Surat Permohonan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan mengisi *google form*
2. Fotocopy Pengesahan sebagai badan hukum
3. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan
4. Kelengkapan dan isi perjanjian kerja.

Mekanisme:

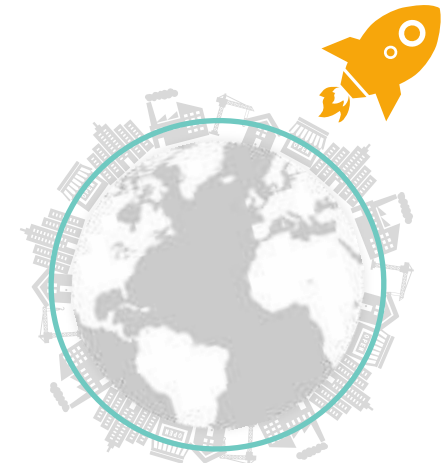
1. Menyerahkan persyaratan ke Dinas Tenaga Kerja
2. Di validasi Kepala Bidang Lattas HI atau Sub Koordinator Hubungan Industrial
3. Tanda Daftar ditandatangani kepala Dinas

Lama Proses : 7 hari

Output : Tanda Daftar Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Biaya : Gratis

Pengaduan: https://bit.ly/LayananPengaduan_Disnaker



Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Bipartit
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per.32/Men/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit.
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

Persyaratan

1. Perusahaan yang memiliki tenaga kerja minimal 50 orang.
2. Surat Permohonan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan mengisi *google form*
3. Foto copy Berita Acara Pembentukan
4. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
5. Susunan Pengurus

Mekanisme:

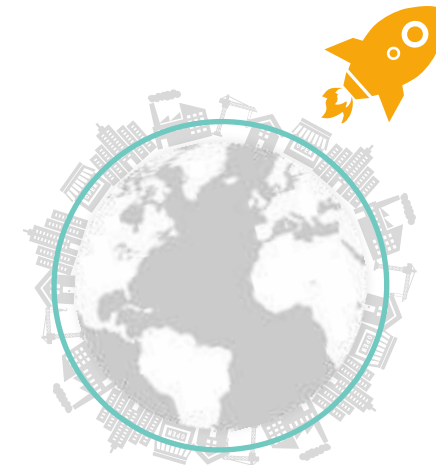
1. Menyerahkan persyaratan ke Dinas Tenaga Kerja
2. Di validasi Kepala Bidang Lattas HI atau Sub Koordinator Hubungan Industrial
3. Surat Bukti Pencatatan ditandatangani kepala Dinas

Lama Proses : 7 hari

Output : Surat Bukti Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit

Biaya : Gratis

Pengaduan: https://bit.ly/LayananPengaduan_Disnaker



PENDAFTARAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI UPTD BLK (PBK)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standart Balai Latihan Kerja
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

Persyaratan

1. Foto copy e-KTP 1 Lbr
2. Foto copy ijazah, 1 Lbr dan Foto copy sertifikat 1 Lbr
3. Foto Copy Kartu AK -1, 1 lbr
4. Pas Foto 3 x 4 warna, 2 lbr

Mekanisme:

1. mengisi form pendaftaran secara online di website kemnaker.go.id mendapatkan nomor registrasi
2. Nomor registerasi dibawa ke UPTD Balai Latihan Kerja
3. Menyerahkan persyaratan
4. Mencetak Tanda Pendaftaran, Nomor dan jadwal seleksi yang ditandatangani Kepala UPTD BLK

Lama Proses : 20 menit

Output : Nomor Seleksi

Biaya : Gratis

Pengaduan: https://bit.ly/LayananPengaduan_Disnaker



PENDAFTARAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT (PBM)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Di Daerah
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

Persyaratan

1. Foto copy e-KTP 1 Lbr
2. Pas Foto 3 x 4 warna, 2 lbr

Mekanisme:

1. mengisi form pendaftaran dengan mengisi *google form*
2. Menyerahkan persyaratan dibawa ke Dinas Tenaga Kerja
3. Mencetak Tanda Pendaftaran, Nomor dan jadwal seleksi yang ditandatangani Kepala Dinas

Lama Proses : 20 menit

Output : Tanda Pendaftaran Nomor dan jadwal Seleksi

Biaya : Gratis

Pengaduan: https://bit.ly/LayananPengaduan_Disnaker



Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Ri Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Konsolidasi Tanah Dalam Pelaksanaan Transmigrasi
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

Persyaratan

1. Surat Permohonan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan mengisi *google form*
2. Warga Negara Indonesia (Diutamakan warga Kabupaten Kebumen)
3. Berkeluarga (dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga)
4. Memiliki KTP yang masih berlaku
5. Berusia 18 - 50 Tahun
6. Berbadan sehat
7. Belum pernah bertransmigrasi

Mekanisme:

1. Menyerahkan persyaratan dibawa ke Dinas Tenaga Kerja
2. Mencetak Tanda Pendaftaran, Nomor dan jadwal seleksi yang ditandatangani Kepala Dinas

Lama Proses : 20 menit

Output : Tanda Pendaftaran Nomor dan jadwal Seleksi

Biaya : Gratis

Pengaduan: https://bit.ly/LayananPengaduan_Disnaker



TANDA DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN KERJA PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah
4. Peraturan Menaker Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran LPK
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 -2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan

1. Surat Permohonan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan mengisi *google form*
2. Foto Kopi E- KTP
3. Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Izin Komersial/Operasional OSS
5. Akta Perusahaan dan perubahannya (bila ada)
6. Data lengkap Profil LPK
7. PBG fungsi tempat pelatihan kerja
8. Pas Foto berwarna Penanggung Jawab
9. NPWP Lembaga
10. Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja



Mekanisme:

1. Menyerahkan persyaratan dibawa ke Dinas Tenaga Kerja
2. Mencetak Tanda Pendaftaran, Nomor dan jadwal seleksi yang ditandatangani Kepala Dinas

DPMPTSP

PELAYANAN TENAGA KERJA DPMPTSP LAMA

Berdasarkan : Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020

Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

NO.	BIDANG	PERIZINAN	NONPERIZINAN	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
4	Bidang Tenaga Kerja	1. Izin Operasional Pendirian Bursa Kerja Khusus; 2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja; 3. Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;	1. Rekomendasi Paspor Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri/Calon Pekerja Migran Indonesia;	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen
		4. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	2. Pembuatan dan Perpanjangan Kartu Antar Kerja 1 (Kartu Kuning)	

PELAYANAN DPMPSTP LAMA

Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
AGROCITY OF JAVA

Siperi

Beranda

Permohonan Izin

Informasi Izin

Simulasi Reklame

KSWP

Pengaduan

Login Pemohon

Informasi Izin

Tampilkan 10 data

Cari Data

No	Jenis Izin
1	IZIN PEMASANGAN REKLAME
2	IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI
3	IZIN PRAKTIK TENAGA AHLI GIZI
4	IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSHIP
5	IZIN PRAKTIK BIDAN
6	IZIN PRAKTIK PERAWAT
7	IZIN PRAKTIK SANITARIAN
8	IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS
9	PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN KARTU ANTAR KERJA 1 (KARTU KUNING)
10	REKOMENDASI IZIN PENTAS ORGANISASI KESENIAN

PELAYANAN DPMPSTP LAMA

Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
AGROCITY OF JAVA

Siperi

Beranda

Permohonan Izin

Informasi Izin

Simulasi Reklame

KSWP

Pengaduan

Login Pemohon

Informasi Izin

Tampilkan data

Q Cari Data

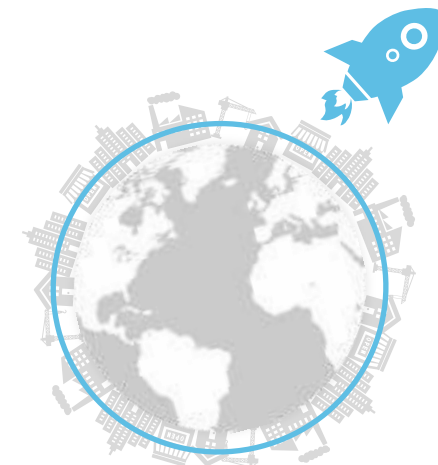
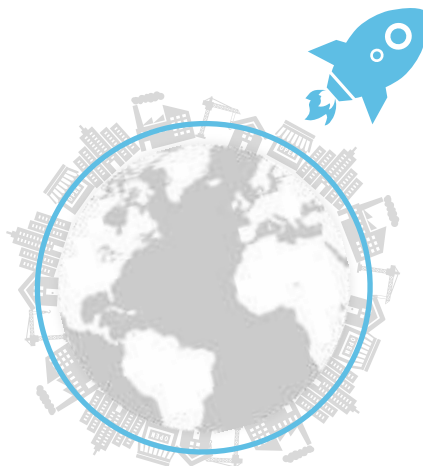
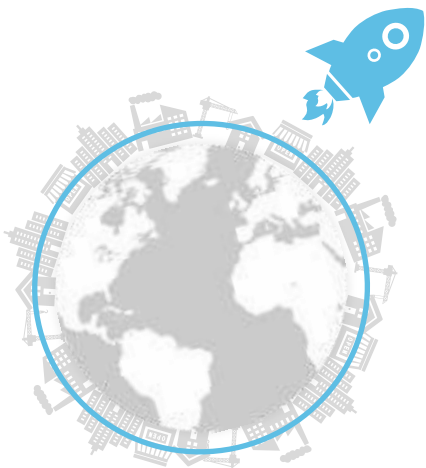
No	Jenis Izin
11	SURAT KETERANGAN PENELITIAN
12	IZIN PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA
13	SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN
14	IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM
15	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG NON BERUSAHA
16	SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT)
17	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM
18	TANDA TERDAFTAR BURSA KERJA KHUSUS (BKK)
19	IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI
20	IZIN OPERASIONAL KLINIK

USULAN PELAYANAN DPMPTSP

Usulan : Draft Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022

Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

No	Bidang	Perizinan	Non Perizinan	OPD Teknis
1	Bidang Tenaga Kerja	Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	Dinas Tenaga Kerja



IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA (LPKS)

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah;
4. Peraturan Menaker Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran LPK
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Persyaratan

1. Foto Kopi E- KTP
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Izin Komersial/Operasional OSS
4. Akta Perusahaan dan perubahannya (bila ada)
5. Data lengkap Profil LPK
6. PBG fungsi tempat pelatihan kerja
7. Pas Foto berwarna Penanggung Jawab
8. NPWP Lembaga
9. Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja

Mekanisme:

1. mengisi form pendaftaran ke DPMPTSP dengan mengisi link: <https://perizinan.kebumenkab.go.id/pendaftaran/formumum>
1. Penerimaan berkas
2. Verifikasi berkas
3. Survey lapangan

Lama Proses : 7 hari

Output : Izin Pendirian dan Operasional

Biaya : Gratis Pengaduan: <https://perizinan.kebumenkab.go.id/home/pengaduan>





Disnaker



UPTD BLK



TERIMA KASIH